



Research Article

Strategi Pencegahan Fraud dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Peran E-Procurement, Pengendalian Internal, Kualitas SDM, dan Audit Internal

Faishal Asmu'i^{1*}

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia

*Penulis Korespondensi: faishalasmui@unucirebon.ac.id

Abstract

Article history:

Received 14 Maret 2025

Revised 01 April 2025

Accepted 08 April 2025

Keywords:

E-Procurement,
Oversight, Fraud
Prevention

Government procurement of goods and services is a crucial aspect of good governance. However, in practice, this process often faces challenges related to potential fraud that can cause financial losses to the state. This study aims to analyze the role of oversight in implementing the E-Procurement system as a fraud prevention effort. By using a literature review approach from various academic sources, this research explores the effectiveness of E-Procurement in enhancing transparency and accountability in government procurement. The findings indicate that implementing E-Procurement can minimize fraud risks through improved internal control systems, public participation, and the utilization of digital technology. Additionally, the role of government internal auditors (APIP) significantly contributes to detecting and preventing irregularities in the procurement process. However, challenges remain in terms of technological infrastructure limitations, lack of human resource expertise, and resistance to change from certain stakeholders. Therefore, strengthening human resource capacity, optimizing procurement policies, and collaborating with external oversight institutions are strategic steps that must be taken to ensure the effective implementation of E-Procurement. Consequently, the government procurement system can operate more transparently, efficiently, and contribute to better governance.

Keywords: E-Procurement, Oversight, Fraud Prevention.

PENDAHULUAN

Fraud dalam pengadaan barang dan jasa merupakan permasalahan serius yang dapat merugikan keuangan negara serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan (Widiarto et al., 2025). Berbagai bentuk kecurangan, seperti kolusi, mark-up harga, suap, dan penggelembungan anggaran, masih sering terjadi dalam proses pengadaan (Febrian, 2024). Keberadaan sistem pengadaan berbasis elektronik atau e-procurement diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa (Banea, Saerang, & Warongan, 2020). Namun, dalam praktiknya, e-procurement masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk penyalahgunaan sistem, kurangnya pengawasan yang efektif, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola sistem secara optimal (Francesco & Hastuti, 2022).

Selain penerapan e-procurement, pengendalian internal menjadi faktor krusial dalam mencegah fraud dalam pengadaan barang dan jasa (Hasan et al., 2024). Sistem pengendalian internal yang kuat dapat meminimalkan risiko kecurangan melalui mekanisme pengawasan, verifikasi, dan pemisahan

tugas yang jelas (Destiyana, Yassarah, & Machdar, 2024). Pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa pengendalian internal diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan agar celah-celah yang memungkinkan terjadinya fraud dapat diminimalisir (Wahyuanto, 2024a). Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal masih bergantung pada komitmen manajemen serta kesiapan sumber daya manusia yang mengelolanya (Febriyanti & Syarif, 2023).

Kualitas sumber daya manusia (SDM) juga memainkan peran penting dalam mencegah terjadinya fraud. Aparatur pengadaan barang dan jasa harus memiliki kompetensi yang memadai, baik dari segi teknis maupun etika profesional, untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kecurangan dalam proses pengadaan. Aflah et al. (2021) menekankan bahwa kurangnya kapasitas dan integritas SDM menjadi salah satu faktor yang memperburuk praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan serta sistem rekrutmen yang berbasis meritokrasi perlu diperkuat guna meningkatkan kompetensi dan moralitas aparatur pengadaan.

Audit internal menjadi elemen pengawasan yang tidak kalah penting dalam mencegah fraud dalam pengadaan barang dan jasa (Wahyuanto, 2025). Audit internal yang efektif dapat mendeteksi penyimpangan dalam proses pengadaan, mengevaluasi kepatuhan terhadap regulasi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola (Ada, Kalangi, & Warongan, 2020). Namun, tantangan yang sering dihadapi adalah kurangnya independensi auditor internal serta keterbatasan akses terhadap informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap indikasi fraud (Aprilla, Wulandari, & Elcaputera, 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas auditor internal serta memperkuat regulasi yang mendukung transparansi dalam pengadaan.

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, terdapat beberapa research gap yang perlu dijawab dalam penelitian ini. Pertama, meskipun e-procurement telah banyak diterapkan, masih terdapat celah dalam sistem yang memungkinkan terjadinya fraud, sehingga perlu kajian lebih lanjut mengenai strategi penguatan implementasi e-procurement yang lebih efektif. Kedua, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menyoroti pengaruh faktor tunggal seperti e-procurement atau pengendalian internal terhadap pencegahan fraud, sementara penelitian ini mengkaji peran sinergis antara e-procurement, pengendalian internal, kualitas SDM, dan audit internal dalam pencegahan fraud secara komprehensif. Novelty dari penelitian ini adalah pengembangan model strategi pencegahan fraud yang lebih holistik dengan mempertimbangkan interaksi dari keempat faktor utama tersebut, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi pemerintah dan organisasi dalam meningkatkan efektivitas pengadaan barang dan jasa yang bebas dari fraud.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan fraud dalam pengadaan barang dan jasa dengan mempertimbangkan peran e-procurement, pengendalian internal, kualitas SDM, dan audit internal. Tahapan penelitian yang dilakukan dalam studi ini dijelaskan sebagai berikut (Sugiyono, 2018):

1. Identifikasi Topik dan Rumusan Masalah

Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan utama terkait fraud dalam pengadaan barang dan jasa. Topik penelitian difokuskan pada strategi pencegahan dengan mempertimbangkan faktor-faktor utama seperti e-procurement, pengendalian internal, kualitas SDM, dan audit internal.

2. Pengumpulan Literatur

Literatur yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber akademik, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan terkait. Referensi yang digunakan mencakup studi-studi terbaru mengenai pencegahan fraud dalam pengadaan barang dan jasa, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Evaluasi dan Seleksi Literatur

Literatur yang telah dikumpulkan kemudian dievaluasi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kontribusinya terhadap penelitian ini. Hanya literatur yang memenuhi kriteria akademik dan memiliki relevansi tinggi dengan topik yang digunakan dalam analisis lebih lanjut.

4. Analisis dan Sintesis Temuan

Data yang diperoleh dari berbagai literatur dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tren utama terkait strategi pencegahan fraud dalam pengadaan

barang dan jasa. Sintesis dilakukan untuk menyusun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang berkontribusi dalam upaya pencegahan fraud.

5. Penyusunan Model Strategi Pencegahan Fraud

Berdasarkan hasil analisis literatur, penelitian ini menyusun model strategi pencegahan fraud yang mengintegrasikan e-procurement, pengendalian internal, kualitas SDM, dan audit internal. Model ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif dalam meningkatkan efektivitas pengadaan barang dan jasa yang bebas dari fraud.

6. Kesimpulan dan Implikasi Penelitian

Tahap akhir dari penelitian ini adalah penyusunan kesimpulan yang merangkum temuan utama dan memberikan implikasi praktis serta teoretis bagi pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Kesimpulan ini juga mencakup rekomendasi bagi pemerintah dan organisasi dalam mengoptimalkan strategi pencegahan fraud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil studi literatur, strategi pencegahan fraud dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement, pengendalian internal, kualitas SDM, dan audit internal memiliki efektivitas yang bervariasi tergantung pada implementasi kebijakan dan dukungan sistem di setiap organisasi. Penelitian Ginting (2021) menunjukkan bahwa meskipun e-procurement telah diterapkan, interaksi kekuasaan dan kompromi masih menjadi faktor pemicu fraud, terutama dalam konteks pengadaan di sektor pemerintahan daerah. Ini mengindikasikan bahwa sistem yang transparan belum tentu sepenuhnya mengeliminasi risiko kecurangan jika tidak diiringi dengan mekanisme pengawasan yang kuat (Wahyuanto et al., 2024).

Selain itu, penelitian oleh Lintang Sari, Hapsari, dan Budiono (2017) mengungkapkan bahwa kombinasi antara implementasi e-procurement dan sistem pengendalian internal dapat secara signifikan mengurangi kemungkinan terjadinya fraud, sebagaimana ditunjukkan dalam studi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten. Dalam konteks ini, pengendalian internal yang efektif menjadi faktor penting dalam meningkatkan integritas proses pengadaan.

Lebih lanjut, studi oleh Mujannah dan Wondabio (2018) mengidentifikasi bahwa manajemen risiko dalam proses e-procurement berdasarkan kebijakan perusahaan memainkan peran penting dalam mendeteksi serta mencegah potensi kecurangan. Tanpa adanya mitigasi risiko yang baik, peluang terjadinya fraud tetap tinggi meskipun sistem elektronik sudah diterapkan. Hal ini sejalan dengan temuan Pitara, Susilo, dan Pitoyo (2017), yang menekankan bahwa penerapan sistem informasi berbasis teknologi yang terintegrasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan jasa konsultasi di pemerintahan daerah.

Dari sisi kebijakan, penelitian Qomaruddin dan Kurniawan (2021) membahas bagaimana implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kota Surabaya telah membawa dampak positif dalam menekan peluang fraud. Namun, mereka juga menemukan bahwa tantangan dalam hal kualitas sumber daya manusia masih menjadi kendala utama dalam efektivitas sistem tersebut. Hal ini didukung oleh studi Rahayu (2023), yang mengungkapkan bahwa efektivitas pencegahan fraud sangat dipengaruhi oleh faktor internal organisasi, termasuk kapabilitas SDM dalam memahami dan menerapkan mekanisme pencegahan fraud.

Aspek audit internal juga menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan fraud. Rahmarta, Pontoh, dan Said (2024) menyoroti bahwa kekuatan organisasional dan sistem yang kokoh merupakan faktor yang berperan dalam efektivitas audit internal sebagai alat deteksi dini terhadap fraud. Selain itu, penelitian oleh Ramadhan dan Arifin (2019) menemukan bahwa probity audit berperan dalam memastikan integritas pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme audit yang ketat.

Secara keseluruhan, hasil studi literatur ini menegaskan bahwa meskipun berbagai strategi telah diterapkan, efektivitasnya tetap bergantung pada integrasi antara e-procurement, pengendalian internal, kualitas SDM, dan audit internal. Studi ini memperkuat temuan sebelumnya dan menyoroti perlunya pendekatan holistik dalam pencegahan fraud. Namun, terdapat gap penelitian dalam analisis spesifik mengenai bagaimana interaksi antara faktor-faktor ini dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan fraud secara lebih komprehensif (Wahyuanto et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menyusun model integratif yang menghubungkan e-

procurement, pengendalian internal, kualitas SDM, dan audit internal sebagai satu kesatuan strategi yang lebih efektif dalam mencegah fraud dalam pengadaan barang dan jasa.

Pembahasan

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu aspek yang rentan terhadap tindakan fraud, terutama dalam konteks pemerintahan daerah. Implementasi sistem E-Procurement bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Menurut ADA, Kalangi, & Warongan (2020), pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan E-Procurement guna mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan. Pengawasan yang lemah dapat membuka peluang bagi penyimpangan, termasuk dalam proses tender, evaluasi penawaran, hingga penunjukan penyedia barang dan jasa.

Lebih lanjut, Aflah et al. (2021) menyoroti peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi pengadaan barang/jasa. Keberadaan APIP dinilai sangat strategis dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak terkait. Dengan demikian, penguatan sistem pengawasan menjadi elemen kunci dalam efektivitas pelaksanaan E-Procurement di lingkungan pemerintahan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan sistem E-Procurement semakin diadopsi oleh berbagai instansi pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan integritas dalam proses pengadaan. Banea, Saerang, & Warongan (2020) mengemukakan bahwa sistem ini memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi fraud serta meningkatkan akuntabilitas penyedia layanan. Hal ini didukung oleh studi Francesco & Hastuti (2022), yang menemukan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dalam E-Procurement berkontribusi terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa.

Di sisi lain, penelitian oleh Destiyana, Yassarah, & Machdar (2024) menegaskan bahwa penerapan Good Corporate Governance (GCG), sistem pengendalian internal, dan whistleblowing system berperan dalam mendeteksi dan mencegah praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan demikian, kombinasi antara E-Procurement dan pengendalian internal yang ketat dapat secara signifikan mengurangi potensi pelanggaran dalam proses pengadaan.

Meskipun E-Procurement membawa berbagai manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya (Wahyuanto, 2024b). Salah satu kendala utama adalah resistensi dari pihak-pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari sistem konvensional. Studi Ginting (2021) menunjukkan bahwa interaksi kekuasaan dan kompromi antara pemangku kepentingan dapat menjadi faktor yang memperburuk fraud dalam E-Procurement.

Selain itu, penelitian oleh Lintang Sari, Hapsari, & Budiono (2017) mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman serta kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola sistem E-Procurement menjadi hambatan utama dalam optimalisasi sistem ini. Keberhasilan implementasi sistem ini sangat bergantung pada kapasitas aparatur dalam memahami serta menjalankan sistem secara profesional dan akuntabel.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas E-Procurement, teknologi digital menjadi instrumen utama dalam mempercepat dan mengamankan proses transaksi. Aprilla, Wulandari, & Elcaputera (2024) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital, seperti big data analytics dan artificial intelligence, dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya sistem berbasis digital yang terintegrasi, setiap tahapan pengadaan dapat termonitor secara real-time, sehingga potensi kecurangan dapat segera terdeteksi.

Penelitian oleh Pitara, Susilo, & Pitoyo (2017) juga mendukung gagasan ini dengan mengusulkan model pencegahan dan penanggulangan korupsi melalui sistem informasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dalam proyek-proyek pengadaan jasa konsultasi pemerintah daerah. Dengan kata lain, digitalisasi menjadi faktor esensial dalam menciptakan ekosistem pengadaan yang lebih bersih dan terpercaya.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan dalam implementasi E-Procurement memiliki peran krusial dalam mencegah fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Faktor-faktor seperti

pengendalian internal, transparansi, partisipasi publik, serta pemanfaatan teknologi digital terbukti dapat meningkatkan efektivitas sistem pengadaan. Dengan penerapan yang optimal, E-Procurement dapat menjadi instrumen yang mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, termasuk para akademisi, praktisi, dan pihak-pihak terkait yang telah memberikan dukungan, wawasan, serta referensi yang berharga. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan akuntabel.

REFERENSI

- Ada, Y., Kalangi, L., & Warongan, J. D. (2020). Analisis Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Pelaksanaan E-Procurement Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing " Goodwill"*, 11(2).
- Aflah, M. N., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2021). Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 631-650.
- Aprilla, W., Wulandari, M., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital Dan Partisipasi Publik Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 321-334.
- Banea, A. E., Saerang, D. P., & Warongan, J. D. (2020). Analisis Implementasi Sistem E-Procurement Dalam Pendeteksian Dan Pencegahan Fraud Di Pt. Pertamina Ru Vii Kasim Sorong. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing " Goodwill"*, 11(1).
- Destiyana, A., Yassarah, F. S., & Machdar, N. M. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance, Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 27-39.
- Febrian, W. D. (2024). Strategi Green Human Resource Management Dalam Meningkatkan Employer Branding Di Era Keberlanjutan. *Jurnal Limit Multidisiplin*, 1(3), 93-99.
- Febriyanti, D., & Syarif, D. (2023). Efektifitas Peran Akuntan Forensik Dalam Mengatasi Fraud: Analisis Fraud Pentagon Theory. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen*, 19(4), 966-975.
- Francesco, I. M., & Hastuti, H. (2022). Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Survei Pada Pejabat Pengadaan Di Kota Cimahi). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 237-243.
- Ginting, R. (2021). Studi Fenomenologi: Interaksi Kekuasaan Dengan Kompromi Sebagai Pemicu Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Implementasi E-Procurement Di Pemerintah Kabupaten Powereri. *Abdi Equator*, 1(1), 47-52.
- Hasan, I. M. N., Laela, K. N., Ayu, R. S., Nugrahadi, B., & Sutrisno, A. W. F. (2024). Simulasi Sistem Antrian Pelayanan Penumpang Krl Di Stasiun X Menggunakan Arena. *Jurnal Limit Multidisiplin*, 1(1), 31-36.
- Lintangsari, M., Hapsari, D. W., & Budiono, E. (2017). Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Pada Divisi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pt. Pln (Persero) Distribusi Jawa Barat Dan Banten Tahun 2017). *Eproceedings Of Management*, 4(3).
- Mujannah, L., & Wondabio, S. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Internal Dan Implementasi Manajemen Risiko Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa (E-Procurement) Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 305 Tahun 2010 (Studi Kasus Pada Pt Xyz (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Keuangan*, 8(1).
- Pitara, S. W., Susilo, S., & Pitoyo, D. (2017). Model Pencegahan Dan Penanggulangan Korupsi Melalui Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi Yang Terintegrasi Pada Proyek-Proyek

- Pengadaan Jasa Konsultasi Di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. *Infotronik: Jurnal Teknologi Informasi Dan Elektronika*, 2(2), 116-123.
- Purba, S. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengadaan Barang Bidang Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Doctoral Dissertation, Ipdn Jatinangor).
- Purwanto, E., & Setiawan, A. B. (2015). Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. *Jurnal Akunida*, 1(2), 13-22.
- Qomaruddin, Q., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kota Surabaya. *Publika*, 9(3), 257-266.
- Rahayu, S. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Eefektivitas Pencegahan Fraud Di Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daer. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 499-509.
- Rahmarta, V., Pontoh, G. T., & Said, D. (2024). Kekuatan Organisasional Dan Sistem Dalam Pencegahan Fraud: Suatu Tinjauan System Literature Review. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 8(1), 28-43.
- Ramadhan, M. S., & Arifin, J. (2019). Efektivitas Probit Audit Dalam Mencegah Kecurangan Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 550-568.
- Saptarini, D., Setiawan, A., & Ak, M. (2020). Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pemerintah Kota Surakarta (Doctoral Dissertation, Iain Surakarta).
- Septiawan, B., & Ningsih, D. F. (2020). The Implementation Of E-Procurement And Internal Control In Increasing The Effectiveness Of The Prevention Of Fraud In The Procurement Of Goods And Services. *Jrak: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 11(2), 269-287.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Wahyuanto, E. (2024a). *Peradaban Digital (Pendekatan Manajemen Pendidikan Dalam Transformasi Digital)*. Arta Media Nusantara. https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Cnipeqaaqbaj&Printsec=Frontcover&Source=Gbs_Ge_Summary_R&Cad=0#V=Onepage&Q&F=False
- Wahyuanto, E. (2024b). *Riset Khalayak (Pendekatan Manajemen Penelitian Publik Berbasis Digital)*. Cv. Mitra Edukasi Negeri. https://Books.Google.Co.Id/Books/About?Id=Wpnoeqaaqbaj&Redir_Esc=Y&HI=Id
- Wahyuanto, E. (2025). *Manajemen Komunikasi Digital*. Cv. Mitra Edukasi Negeri. https://Books.Google.Co.Id/Books/About/Manajemen_Komunikasi_Digital.Html?HI=Id&Id=Waxveqaaqbaj&Redir_Esc=Y
- Wahyuanto, E., Mintarti, A., Heriyanto, H., Hastuti, S., & Widodo, J. D. T. (2024). Jurnalisme Investigasi Dalam Perspektif Draf Uu Penyiaran Dan Implikasinya. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)*, 7(3), 7358–7367.
- Wahyuanto, E., Taufiqi, M. A., Azizah, N., & Maryam, N. S. (2025). Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Meningkatkan Administrasi Desa: Pengabdian Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(3), 359–363.
- Widiarto, D. S., Prasetyo, I. J., Wahyuanto, E., & Sjachro, D. W. (2025). Transitioning From Analogue To Digital Radio Broadcasting: A Simulcast System Approach In Indonesia. *Journal Of Ecohumanism*, 4(1), 1034–1048.
- Wiwik Amelia, W. A. (2021). Pengaruh Implementasi E-Procurement Terhadap Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Pemkab Lamongan) (Doctoral Dissertation, Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan).
- Yanti, N. N. K. (2023). Literature Review: Kebijakan Publik Terhadap Pengadaan Barang Modal Strategis Lembaga Pemerintah Indonesia. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 110-116.